



PROFIL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada Bab II berikut ini menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kota Singkawang merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Terletak diantara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan yang terkecil luas wilayahnya setelah Kota Pontianak. Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 dengan Ibukota Singkawang merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkayang. Secara umum Kota Singkawang merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

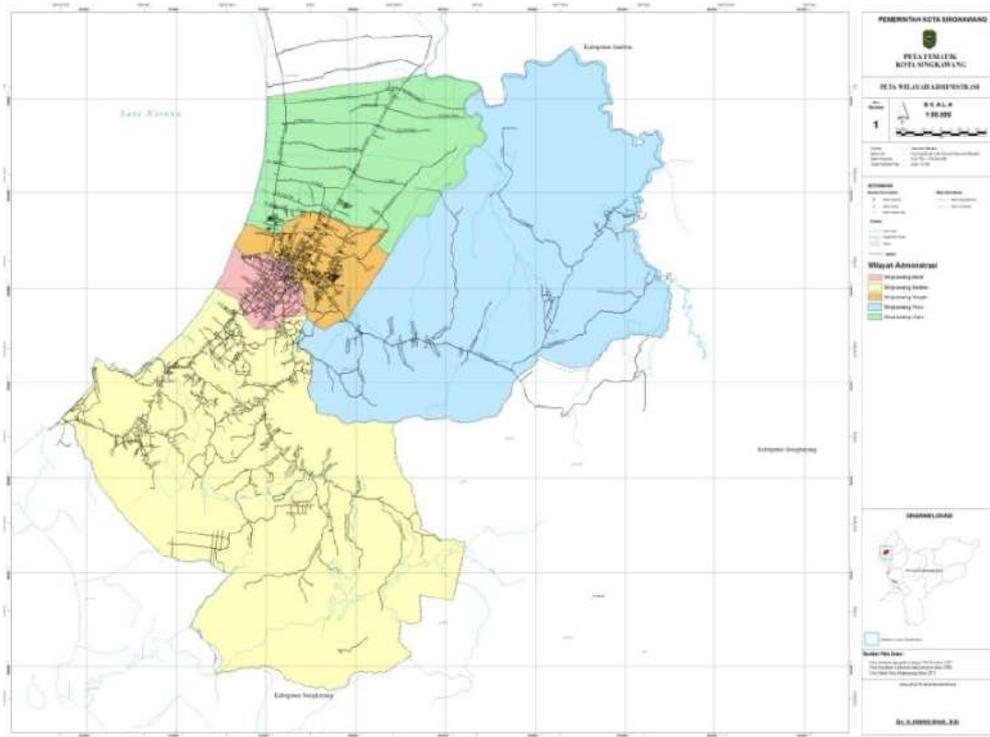
2.1.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Singkawang terletak pada $0^{\circ}44'55,85''-01^{\circ}01'21,51''$ Lintang Utara dan $108^{\circ}51'47,6''-109^{\circ}10'19''$ Bujur Timur di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Luas wilayah Kota Singkawang 504 Km^2 (50.400 Ha) atau sekitar 0,43 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Batas-batas wilayah selengkapnya untuk Kota Singkawang adalah:

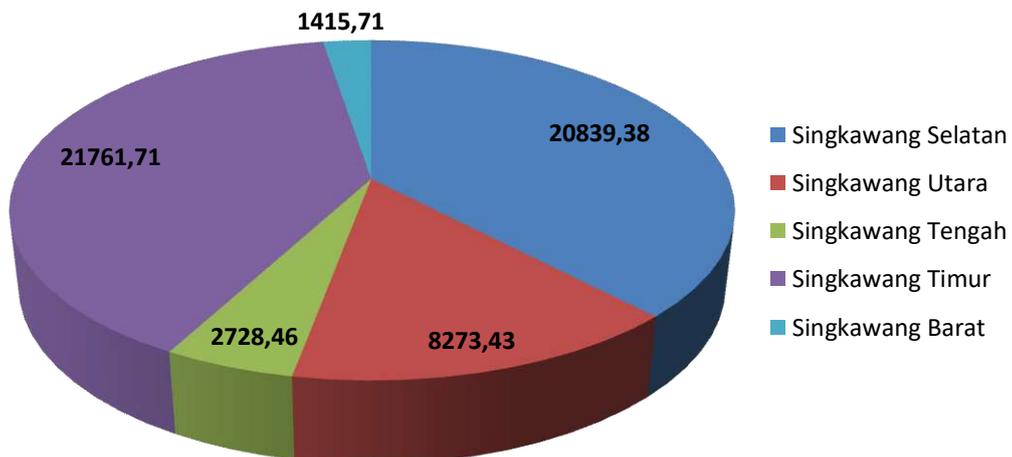
- Utara : Kabupaten Sambas
- Selatan : Kabupaten Bengkayang
- Timur : Kabupaten Bengkayang
- Barat : Laut Natuna

Gambar 2.1.1.
Peta Administrasi Kota Singkawang



Secara administratif, Kota Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.761,71 Ha, sedangkan Kecamatan Singkawang Barat merupakan wilayah terkecil yaitu 1.415,71 Ha dari wilayah Kota Singkawang.

Grafik 2.1.1.
Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam Ha)



Geologi

Dari Lima jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang sebagian besar merupakan tanah Aluvial (25.338 Ha) sedangkan yang terkecil adalah tanah Lasotol (2.988 Ha). Beberapa jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

- ✓ **Organosol** yaitu tanah yang tersusun dari bahan organik/campuran bahan mineral dan bahan organik. Jenis tanah ini mudah mengeruttak balik dan bila kering pekat terhadap erosi serta mudah terbakar. Terdapat seluas 3.752 ha atau sekitar 7,44 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Alluvial** yaitu jenis tanah yang berwarna kelabu, coklat sampai hitam, mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi dan cocok digunakan untuk usaha budidaya pertanian, dan terbentuk dari endapan laut, sungai dan danau terdapat seluas 25.338 ha atau 50,27 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Podsol** yaitu tanah yang bersifat basa dengan tingkat kejenuhan yang rendah, berwarna kuning putih, pada umumnya bertekstur kasar karena terbentuk dari batuan endapan serta termasuk miskin unsur hara.Terdapat 14.276 ha atau 28,33 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **Latasol** yaitu jenis tanah yang memiliki solusi tanah yang tebal antara 130-200 cm, berwarna coklat, merah sampai kekuning-kuningan. Tanah ini sangat peka terhadap erosi tetapi sangat potensial dikembangkan sebagai usaha pertanian. Terdapat seluas 2.988 ha atau 5,93 persen dari total wilayah kota.
- ✓ **PMK (Podsolid Merah Kuning)** yaitu jenis tanah ini berwarna kuning merah, bereaksi masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah, sebagian telah dibudidayakan untuk perkebunan karet dan ladang dengan luas 4.046 ha atau 8,03 persen dari total luas wilayah kota.

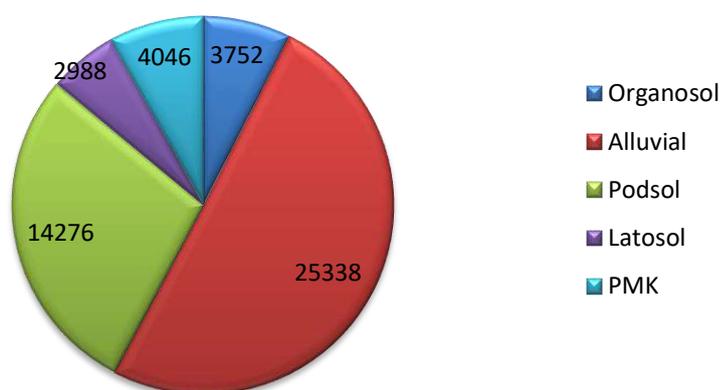
Tabel 2.1.1.
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Area		Jenis Tanah				
		(Ha)	(%)	Organosol	Alluvial	Podsol	Latasol	PMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Singkawang Selatan	22.448	45	1.052	11.784	2.880	2.988	3.744
2.	Singkawang Timur	16.626	33	2.200	3.926	10.500	-	-

3.	Singkawang Utara	6.665	13	500	6.165	-	-	-
4.	Singkawang Barat	1.504	3	-	904	600	-	-
5.	Singkawang Tengah	3.157	6	-	2.559	296	-	302
Jumlah		50.400	100,00	3.752	25.338	14.276	2.988	4.046
Persentase (%)		100,00		7,44	50,27	28,33	5,93	8,03

Sumber: KDA Kota Singkawang 2021

Grafik 2.1.2
Luas (Ha) Menurut Jenis Tanah Tahun 2021



Sumber: KDA Kota Singkawang 2021

2.1.1.1.2. Topografi

Berdasarkan topografi, wilayah kota di Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dataran dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 31.904 hektar tersebar di 5 kecamatan, sedang bukit dan gunung seluas 18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah pegunungan dan perbukitan. Luas wilayah tergenang mencapai 14.147 hektar (28,07 persen dari total luas wilayah) tersebar diseluruh kecamatan. Untuk daerah tergenang, Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan yang paling luas tergenang (6.126 hektar), sedangkan Kecamatan Singkawang Barat wilayahnya paling sedikit tergenang (1.206 hektar). Luas wilayah yang tidak tergenang mencapai 36.253 hektar (71,93 persen dari total wilayah), dari 36.253 hektar yang tidak tergenang 8,32 persen jenis porous dan sisanya 91,68 persen bukan porous.

Dilihat dari tekstur tanah, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang terdiri dari jenis tanah halus yang meliputi areal 24.238 hektar (48,09 persen), berikutnya jenis tanah sedang 18.496 hektar (36,70 persen), jenis tanah kasar 3.168 hektar (6,29 persen), jenis tanah gambut 3.940 hektar (7,82 persen), jenis tanah rawa 256 (0,51 persen) dan jenis tanah lainnya 302 (0,60 persen). Jika berdasarkan kelas lereng, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang berada pada kelas kurang dari 2 persen (37.236 hektar atau 73,88 persen), dan luas wilayah paling kecil berada pada kelas diatas 40 persen (812 hektar atau 1,61 persen). Berdasarkan penggunaan tanah, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen).

2.1.1.1.3. Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaan lahan, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen). Dari 50.400 hektar luas wilayah Kota Singkawang, areal untuk pemukiman hanya 358,0 hektar (0,71 persen), sementara areal untuk industri merupakan yang areal yang paling kecil yaitu hanya sekitar 10 hektar (0,02 persen). Areal-areal yang lain adalah berupa padang/semak (10,73 persen), hutan belukar (6,51 persen), kebun campuran (5,22 persen), pertambangan (2,61 persen), dan lain-lain (0,50 persen).

Tabel 2.1.2.

Penggunaan Lahan Kota Singkawang

No	Uraian	Luas Areal (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	358,00	0,71
2	Industri	10,00	0,02
3	Pertambangan	1.317,00	2,61
4	Sawah Irigasi Non Teknis	6.512,00	12,92
5	Hutan Belukar	3.280,00	6,51
6	Kebun Campuran	2.629,00	5,22
7	Perkebunan	22.980,00	45,60
8	Hutan	7.656,00	15,19
9	Padang/Semak	5.408,00	10,73
10	Perairan Darat	-	-
11	Tanah Terbuka	-	-
12	Lain-lain	250,00	0,50
JUMLAH/TOTAL		50.400,00	100,00

Sumber : KDA Kota Singkawang 2020

2.1.1.2 Demografi

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah berpenduduk multi etnis, dengan keragaman corak budayanya. Kemajemukan penduduk ini berdampak pada terjadinya pembauran (asimilasi) budaya dan sosial. Asimilasi terjadi diantaranya melalui perkawinan, hubungan kerja, dan interaksi hubungan bertetangga yang kemudian melahirkan model kehidupan berkeluarga dan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Data demografi Kota Singkawang tahun 2021 berdasarkan BPS Kota Singkawang ditampilkan pada Tabel 2.1.3 berikut:

Tabel 2.1.3.
Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Singkawang Selatan	4	224,48	55.830	248,71
2	Singkawang Timur	5	166,26	23.555	141,68
3	Singkawang Utara	7	66,65	31.703	475,66
4	Singkawang Barat	4	15,04	55.790	3.709,44
5	Singkawang Tengah	6	31,57	71.013	2.249,38
Jumlah/ Total		26	504,00	237.891	472,01

Sumber : BPS Kota Singkawang, SP 2022 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan menjadi dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Tabel 2.1.4.
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Kota Singkawang
Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017		2018*		2019		2020		2021	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1081,99	12,00	1134,87	11,71	1159,87	11,34	1200,55	11,86	1293,67	11,89
2	Pertambangan dan Penggalian	430,17	4,77	465,09	4,80	492,84	4,82	500,48	4,94	542,77	4,99
3	Industri Pengolahan	1271,47	14,11	1364,38	14,08	1460,88	14,28	1470,46	14,52	1603,08	14,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,77	0,13	13,27	0,14	14,63	0,14	15,16	0,15	16,00	0,15
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29,78	0,33	32,11	0,33	34,92	0,34	37,42	0,37	40,54	0,37
6	Konstruksi	1498,62	16,63	1581,83	16,32	1636,95	16,00	1598,44	15,79	1790,45	16,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1780,65	19,76	1958,24	20,21	2126,46	20,79	1987,49	19,63	2065,37	18,99
8	Transportasi dan Pergudangan	219,45	2,43	236,36	2,44	251,45	2,46	251,68	2,49	255,86	2,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30047	3,33	332,69	3,43	360,45	3,52	332,47	3,28	367,44	3,38
10	Informasi dan Komunikasi	262,66	2,91	287,90	2,97	306,19	2,99	328,37	3,24	338,93	3,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	396,62	4,40	442,07	4,56	437,77	4,28	427,60	4,22	460,02	4,23
12	Real Estat	262,78	2,92	280,14	2,89	291,10	2,85	294,40	2,91	304,48	2,80
13	Jasa Perusahaan	59,71	0,66	63,27	0,65	67,21	0,66	66,45	0,66	66,39	0,61
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	592,54	6,57	635,35	6,56	673,75	6,59	715,34	7,06	749,78	6,89
15	Jasa Pendidikan	535,44	5,94	567,41	5,85	597,26	5,84	546,50	5,40	572,76	5,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135,55	1,50	144,87	1,49	154,30	1,51	208,93	2,06	269,58	2,48
17	Jasa Lainnya	143,36	1,59	151,54	1,56	162,35	1,59	144,49	1,43	140,80	1,29
	PDRB	9013,05	100	9691,38	100	10228,39	100	10126,22	100	10877,85	100

Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka 2022

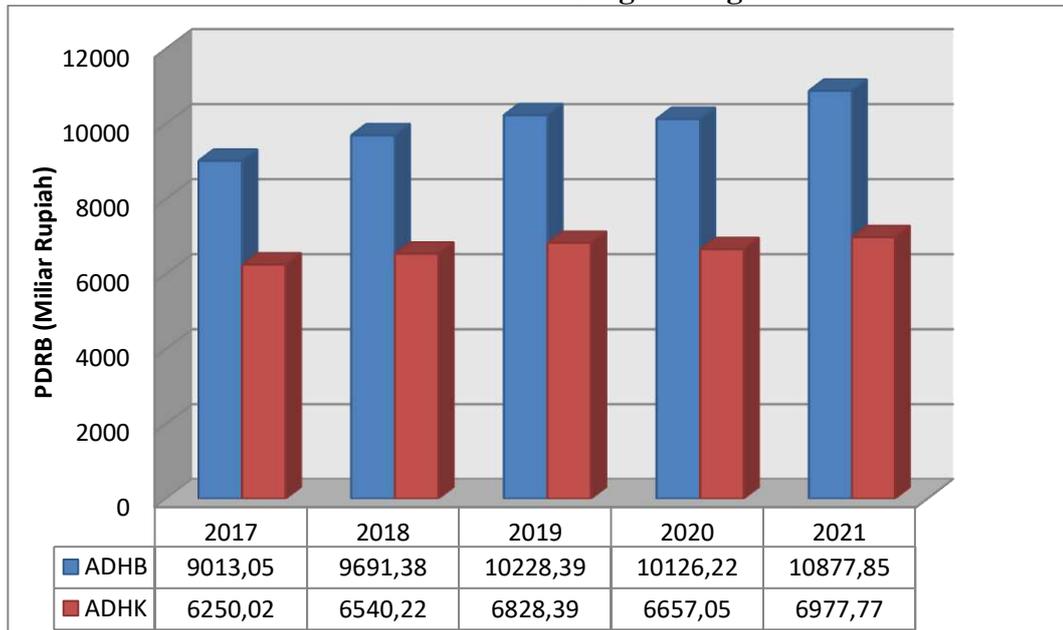
Tabel 2.1.5.
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK 2010 Kota Singkawang
Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Miliar Rp	%								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	829,97	5,50	854,10	2,91	887,34	3,89	890,51	0,36	927,53	4,16
2	Pertambangan dan Penggalian	264,99	3,25	273,14	4,19	282,28	3,35	282,10	-0,06	299,43	6,14
3	Industri Pengolahan	869,50	6,05	915,63	14,01	966,74	5,58	958,88	-0,90	1001,99	4,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,23	3,48	10,63	0,16	10,90	2,61	11,06	1,46	11,45	3,46
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,99	7,16	26,26	0,41	28,10	7,00	29,85	6,21	31,59	5,85
6	Konstruksi	935,09	4,27	960,74	14,68	984,39	2,46	934,78	-5,04	996,81	6,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1335,18	6,06	1420,05	21,74	1516,26	6,78	1402,15	-7,53	1453,69	3,68
8	Transportasi dan Pergudangan	172,93	4,24	182,07	2,78	192,14	5,53	189,48	-1,39	189,38	-0,05
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	211,91	7,02	227,26	3,47	242,10	6,53	219,92	-9,16	238,90	8,63
10	Informasi dan Komunikasi	250,97	11,83	271,42	4,07	285,82	5,31	303,51	6,19	312,82	3,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	302,05	6,22	323,37	4,94	315,28	-2,50	309,98	-1,68	320,41	3,37
12	Real Estat	175,90	3,17	180,74	2,77	185,13	2,43	185,47	0,19	191,17	3,07
13	Jasa Perusahaan	43,73	2,73	45,19	0,69	47,25	4,57	46,77	-1,03	47,03	0,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	256,31	5,06	266,46	4,07	278,10	4,37	289,55	4,12	299,29	3,36
15	Jasa Pendidikan	362,96	2,35	372,30	5,69	383,55	3,02	356,89	-6,95	372,88	4,48

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90,35	3,88	94,31	1,44	98,95	4,92	130,55	31,93	165,96	27,13
17	Jasa Lainnya	112,96	5,01	116,55	1,81	124,05	6,43	116,39	-6,18	117,42	0,89
	PDRB	6250,02	100	6540,22	100	6828,39	4,41	6657,05	-2,51	6977,77	4,82

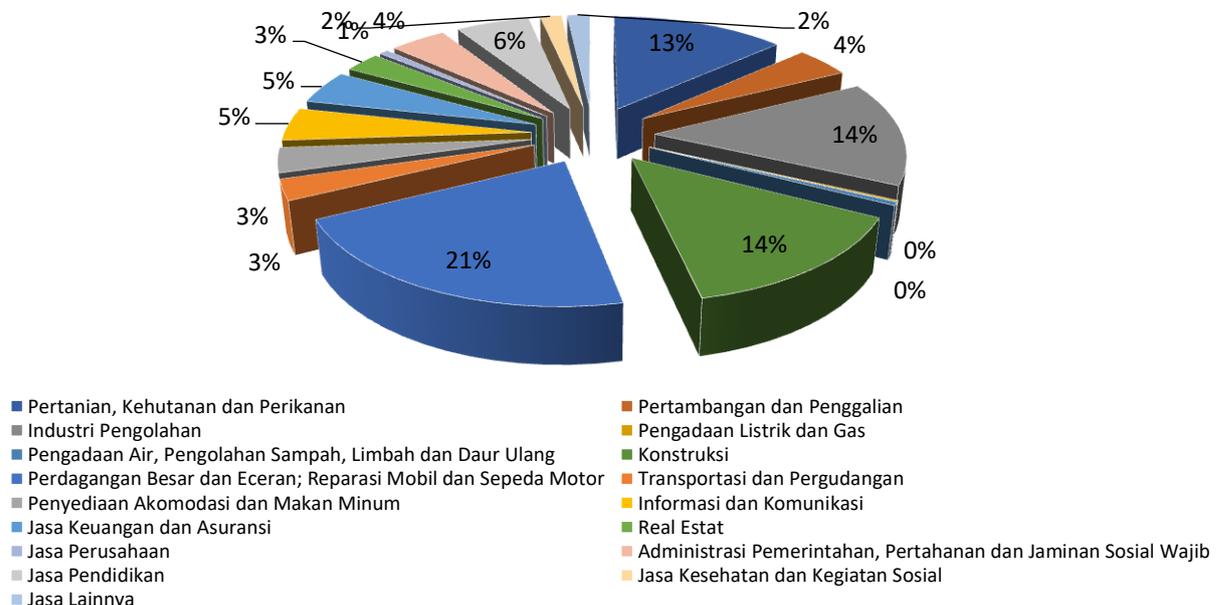
Sumber : Kota Singkawang Dalam Angka 2022

Grafik 2.1.3
PDRB ADHB & ADHK 2010 Kota Singkawang Tahun 2017-2021



Sumber: Singkawang Dalam Angka 2022

Grafik 2.1.4
Kontribusi Sektorial PDRB ADHK Kota Singkawang Tahun 2022 (%)



Ket: Singkawang Dalam Angka 2022

Berdasarkan data BPS Kota Singkawang, laju pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang tahun 2021 sebesar 4,82 persen. Naik dibandingkan dengan tahun 2020 hanya -2,54. Secara umum pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total PDRB Kota Singkawang, yaitu a) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; b) Industri Pengolahan; c) Konstruksi; dan d) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel 2.1.6.
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kota Singkawang Tahun 2019 – 2021 (%)

No.	Lapangan Usaha	2019		2020*		2021**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,34	3,89	11,86	0,36	11,89	4,16
2	Pertambangan dan Penggalian	4,82	3,35	4,94	-0,06	4,99	6,14
3	Industri Pengolahan	14,28	5,58	14,52	-0,90	14,74	4,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	2,61	0,15	1,46	0,15	3,46
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,34	7,00	0,37	6,21	0,37	5,85
6	Konstruksi	16,00	2,46	15,79	-5,04	16,46	6,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,79	6,78	19,63	-7,53	18,99	3,68
8	Transportasi dan Pergudangan	2,46	5,53	2,49	-1,39	2,35	-0,05
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,52	6,53	3,28	-9,16	3,38	8,63
10	Informasi dan Komunikasi	2,99	5,31	3,24	6,19	3,12	3,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,28	-2,50	4,22	-1,68	4,23	3,37
12	Real Estat	2,85	2,43	2,91	0,19	2,80	3,07
13	Jasa Perusahaan	0,66	4,57	0,66	-1,03	0,61	0,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,59	4,37	7,06	4,12	6,89	3,36
15	Jasa Pendidikan	5,84	3,02	5,40	-6,95	5,27	4,48
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	1,51	4,92	2,06	31,93	2,48	27,13
17	Jasa Lainnya	1,59	6,43	1,43	-6,18	1,29	0,89
PDRB		100	4,41	100	-2,51	100	4,82

Sumber: Singkawang Dalam Angka 2021

2.1.2.2 Inflasi

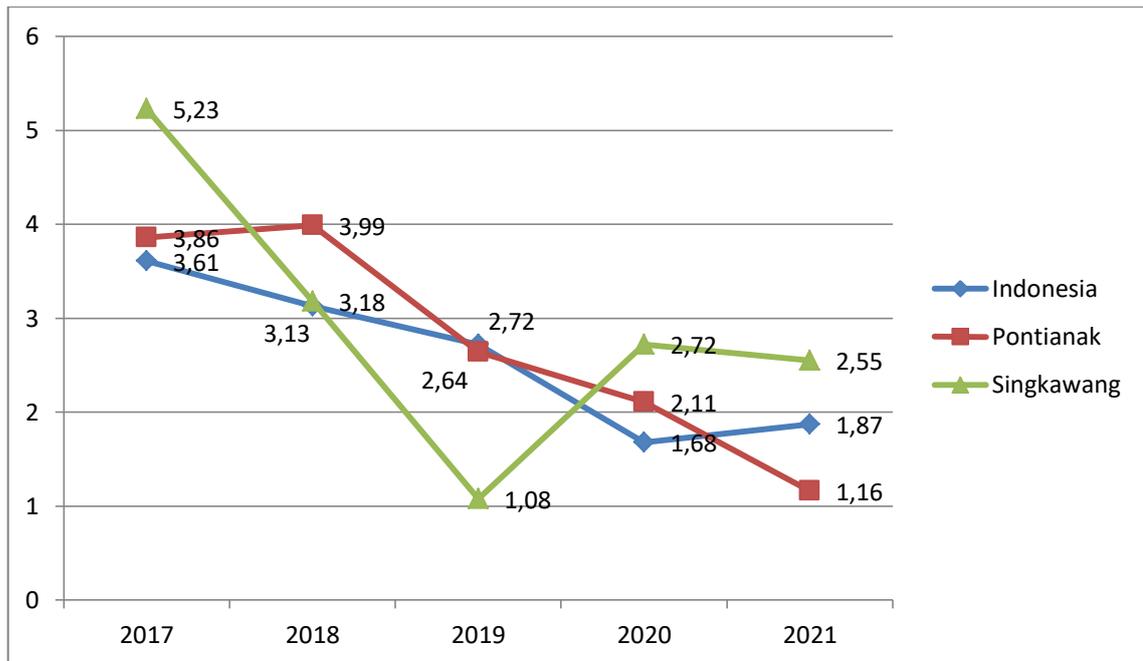
Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan angka inflasi Kota Singkawang dan perbandingan dengan angka inflasi Kota Pontianak dan Indonesia disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.7.
Perkembangan Inflasi Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Wilayah Inflasi	Inflasi (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Indonesia	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	2,60
Pontianak	3,86	3,99	2,64	2,11	1,16	2,75
Singkawang	5,23	3,18	1,08	2,72	2,55	2,95

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2022, data diolah

Grafik 2.1.6.
Perkembangan Inflasi Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kota Singkawang, 2022

2.1.2.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kemakmuran daerah. PDRB Perkapita Kota Singkawang dari tahun 2018 sampai

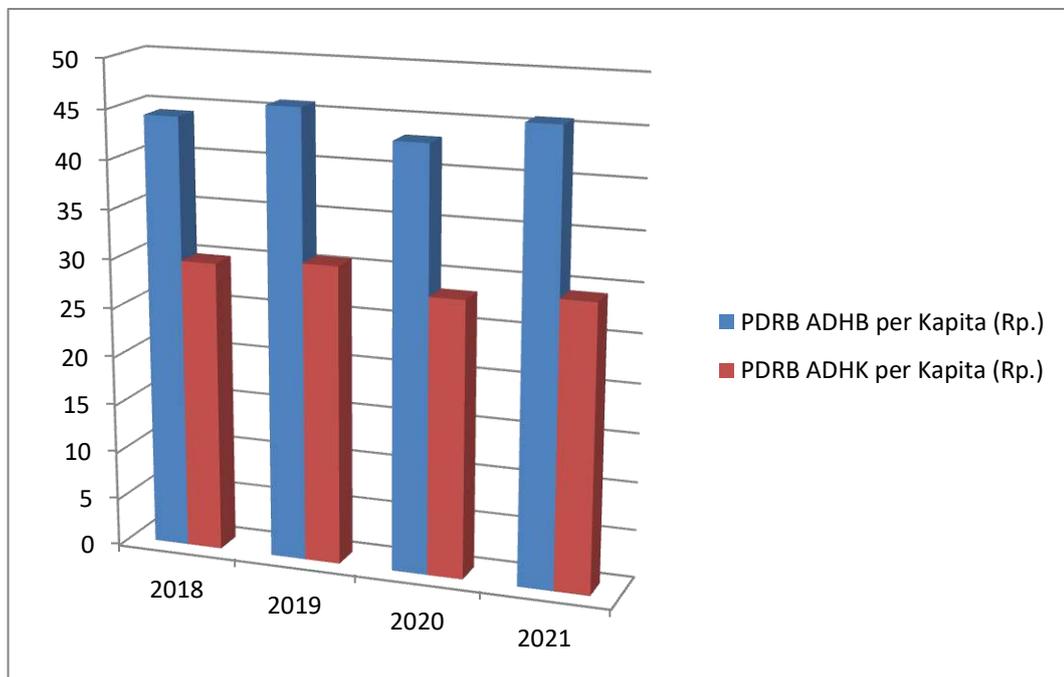
dengan tahun 2021 cenderung fluktuatif. Perkembangan PDRB perkapita Kota Singkawang tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1.9 berikut:

Tabel 2.1.8.
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Kota Singkawang
Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	PDRB ADHB per Kapita (Juta Rupiah)	44,24	45,89	43,22	45,73
2	PDRB ADHK per Kapita (Juta Rupiah)	29,86	30,65	28,41	29,33

Sumber: BPS Kota Singkawang 2022

Grafik 2.1.6
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Kota Singkawang
Tahun 2018-2021 (Juta Rp.)



Sumber: Sing BPS Kota Singkawang, 2022

2.1.2.4 Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan indeks gini. Indeks gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dalam lima tahun terakhir (2017-2021), Kota Singkawang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang ($0,3 \leq G \leq 0,5$) untuk tahun 2017-2018, dan tahun 2019-2021* mengarah

ketimpangan yang tinggi. Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dalam lima tahun terakhir (2017-2021) persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Singkawang cenderung fluktuatif atau mengarah mengalami peningkatan.

Data lengkap kemiskinan dan ketimpangan di Kota Singkawang tahun 2017-2021 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.1.9
Kemiskinan dan Ketimpangan Kota Singkawang
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
			Jumlah	Persentase		
1	2017	410.717	11.610	5,42	0,73	0,17
2	2018	464.673	11.168	5,12	0,70	0,18
3	2019	429.131	10.900	4,91	0,53	0,10
4	2020	510.596	10.230	4,53	0,48	0,09
5	2021	527.892	11.030	4,83	0,73	0,17

Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2022

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: (1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) pengetahuan (*knowledge*); dan (3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Dalam lima tahun terakhir (2017 – 2021) IPM Kota Singkawang terus mengalami peningkatan, dari 70,25 pada tahun 2017 menjadi 72,11 pada tahun 2021 dan sudah masuk ke dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Data lengkap IPM Kota Singkawang beserta komponen pembentuknya tahun 2017 - 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang
Tahun 2017 – 2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	71,13	71,41	71,85	72,06	72,18
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,86	12,87	12,89	12,90	12,91
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,30	7,57	7,72	7,89	7,90
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	11.122.000	11.514.000	11.789.000	11.650.000	11.767.000
IPM	70,25	71,08	71,72	71,94	72,11

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2022

2.1.2.6 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, dihitung dari persentase penduduk menurut kelompok umur yang dapat membaca dan menulis dengan huruf latin dan atau huruf lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, pada tahun ajaran 2018/2019 AMH Kota Singkawang untuk kelompok umur 15 tahun ke atas sebesar 98,72 persen. Deskripsi dalam bentuk tabel dalam kurun waktu 2017/2018-2020/2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.11
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Kota Singkawang Tahun 2017/2018 – 2020/2021

No	Uraian	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis (jiwa)	195.271	198.381	167.533	170.016
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (jiwa)	197.974	200.949	169.972	174.839
3	Angka melek huruf (%)	98,63	98,72	98,56	97,24

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

2.1.2.7 Kesehatan

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan

antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit dibawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Perkembangan persentase balita gizi buruk dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung fluktuatif. Perkembangan prevalensi balita gizi kurang dalam kurun waktu yang sama cenderung fluktuatif.

Tabel 2.1.12
Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,13	71,41	71,85	72,06	72,18
2.	Persentase balita gizi buruk (%)	0,42	0,2	0,3	0,7	0,4
3.	Prevalensi balita gizi kurang (%)	3,5	2,9	4,4	6,5	5,45
4.	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00	88,46	88,00	n/a	n/a

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, 2020, Singkawang Dalam Angka 2020

2.1.2.8 Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja juga meliputi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja berarti semakin luas kesempatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Pada tahun 2021 nilai TPT tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017-2021 sebesar 9,16 persen. Kondisi tenaga kerja Kota Singkawang tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.13
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tenaga Kerja (15 Thn+) (Jiwa)	153.136	156.384	159.726	167.844	171.210
2	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	55.091	60.880	21.646	60.692	61.099
	%	35,98	38,93	13,55	n/a	n/a
3	Angkatan Kerja (Jiwa)	98.045	95.504	106.963	107.152	110.114
	TPAK (%)	64,02	61,07	66,97	63,84	64,31
4	Bekerja (Jiwa)	90.123	87.974	100.075	97.741	100.032
	Persentase thd Angkatan Kerja (%)	91,92	92,12	93,56		
5	Menganggur (Jiwa)	7.922	7.530	6.888	9.411	10.082
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,08	7,88	6,44	8,78	9,16

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, 2022

2.1.2.9 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Singkawang.

Pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbilang kecil. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan pendapatan yang bersumber dari PAD sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Data persentase PAD terhadap pendapatan daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.14
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	132.099.419.000	130.864.903.686	166.200.436.090	154.272.914.307	181.247.816.650
2	Pendapatan Daerah	845.956.951.000	879.090.770	920.008.487.061	826.117.163.781	886.643.880.118
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	15,62	14,89	18,07	18,67	20,44

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2022

2.1.2.10 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau badan lain. BPK RI diberi kewenangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, yang kemudian memberikan opini antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam periode tahun 2017-2021, opini yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2.1.2.11 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja pembangunan yang menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan selama periode 2017-2021 dapat digambarkan melalui indikator pada tabel berikut.

Tabel 2.1.15
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
dalam Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	79,90	82,10	82,30	83,90	84,00
2.	Penguatan cadangan pangan (Ton)	n/a	n/a	n/a	n/a	10
3.	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	5,50	2,91	3,89	0,36	4,16

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2022

2.1.2.12 Pertambangan, Perdagangan dan Industri

Kinerja pembangunan yang menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat pada bidang pertambangan, perdagangan dan industri selama periode 2017-2021 dapat digambarkan melalui indikator pada tabel berikut.

Tabel 2.1.16
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
dalam Bidang Pertambangan, Perdagangan dan Industri
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Kontribusi sektor pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB (%)	3,25	3,08	3,35	-0,06	6,14
2.	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB (%)	6,06	6,36	6,78	-7,53	3,68
3.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	6,05	5,30	5,58	-0,90	4,58

Sumber: BPS Kota Singkawang, 2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan dan penunjang urusan. Masing-masing layanan urusan tersebut dapat disampaikan melalui penjelasan berikut ini.

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sesuai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Indikator yang digunakan untuk melihat aspek pelayanan umum dalam bidang pendidikan Kota Singkawang secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.17
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Singkawang
Tahun 2017/2018-2021/2022

No	Uraian	Tahun				
		2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)					
	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	12,91	13,20	11,75	11,65	11,22
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) :					
	a. APK SD/MI/Paket A	102,38	102,51	104,80	102,25	100,05
	b. APK SMP/MTs/Paket B	89,27	94,52	104,37	105,33	105,55
3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) (%) :					
	a. APT SD/MI/Paket A	59,69	58,82	57,15	56,37	55,87
	b. APT SMP/MTs/Paket B	33,53	33,24	32,69	33,85	33,05
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) (%) :					
	a. APM SD/MI/Paket A	86,54	87,38	90,98	89,24	89,69
	b. APM SMP/MTs/Paket B	66,18	67,50	74,32	76,98	82,25
5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :					
	a. APS SD/MI/Paket A	95,61	94,91	97,84	96,42	95,94
	b. APS SMP/MTs/Paket B	93,45	96,90	95,50	87,05	91,11
6.	Angka Putus Sekolah (%) :					
	a. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,09	0,34	0,44	0,14	0,04
	b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,03	1,06	0,64	0,16	0,17
7.	Angka Kelulusan (AL) (%) :					
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Angka Melanjutkan (AM) (%) :					
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104,27	107,79	110,92	106,39	112,15
9.	Fasilitas Pendidikan (%) :					
	a. Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik	90,19	89,21	96,64	97,95	98,48
	b. Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik	80,22	84,13	96,47	95,38	98,19
10.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (per 10.000):					

No	Uraian	Tahun				
		2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	a. Rasio Ketersediaan SD/MI/ Penduduk Usia 7-12 thn	39	39	39	39	39,35
	b. Rasio Ketersediaan SMP/MTs/ Penduduk Usia 13-15 thn	32	33	36	37	36,73
11.	Rasio Guru/Murid (per 10.000):					
	a. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI	494	465	438	483	510
	b. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs	624	589	583	622	584
	e. Rasio Guru SD/MI /Murid SD/MI /Kelas	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
	f. Rasio Guru SMP/MTs /Murid SMP/MTs /Kelas	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13
12.	Guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D.IV (%)					
	a. SD/MI	71,85	82,64	86,49	85,07	88,51
	b. SMP/MTs	87,34	96,15	95,91	93,66	91,51

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, 2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) rasio jumlah siswa (berapapun usianya) pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA sederajat dibagi jumlah penduduk berusia 3-18 tahun. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan. Secara umum nilai APK pada tahun ajaran 2017/2018 hingga 2021/2022 menunjukkan trend fluktuatif. Peningkatan APK SD dan SMP relatif tidak terlalu besar, namun dari segi angka cukup bagus yaitu diatas 100%. Sedangkan capaian APK PAUD lebih rendah dibanding SD dan SMP, karena kurangnya anak usia dini yang mengenyam pendidikan anak usia dini, baik itu Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK).

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) adalah angka yang menunjukkan status pendidikan terakhir yang telah ditamatkan penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu, yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT merupakan persentase jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, terhadap total jumlah penduduk dalam tahun tertentu.

APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Dalam empat tahun terakhir (2017/2018 - 2021/2022) lebih dari 40% penduduk yang tidak menamatkan pendidikan SD dan lebih dari 60% penduduk yang tidak menamatkan pendidikan SMP. Hal ini disebabkan oleh banyaknya usia penduduk diatas 25 tahun

yang tidak memiliki minat untuk melanjutkan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan paket.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Secara umum nilai APM menunjukkan tren fluktuatif untuk semua jenjang pendidikan. APM sudah melampaui target merupakan gambaran bahwa anak usia sekolah sudah bersekolah sesuai dengan jenjang usia, sehingga tidak ada permasalahan yang signifikan.

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Singkawang selanjutnya dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah, yaitu jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan tertentu. Dalam empat tahun terakhir (2017/2018 - 2021/2022) rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar setara SD/MI masih belum tercapai, berdasarkan usia penduduk 7-12 tahun disebabkan belum adanya tambahan pembangunan sekolah di Kota Singkawang. Namun berdasarkan capaian angka tersebut bukan permasalahan yang terlalu signifikan karena selisih angka capaian hanya 1%.

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Singkawang dilihat dari ketersediaan tenaga pengajar dan ukuran jumlah ideal murid untuk satu guru untuk mencapai mutu pengajaran dapat digambarkan dengan rasio guru terhadap murid yaitu jumlah guru tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah murid jenjang pendidikan tersebut. Dalam empat tahun terakhir (2017/2018 - 2021/2022) rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD dan SMP masih terdapat kekurangan pendidik, hal ini disebabkan banyaknya tenaga pendidik yang pensiun.

2.1.3.1.2. Kesehatan

Data aspek pelayanan umum dalam bidang kesehatan Kota Singkawang tahun 2017 - 2021 yang menggambarkan kinerja pembangunan daerah di Kota Singkawang dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.18
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Kota Singkawang
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	7,58	7,42	5,37	7,67	7,70
2.	Angka Kelangsungan Hidup bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup	992,42	n/a	n/a	992,23	992,03
3.	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	1,64	8,57	7,2	7,91	7,96
4.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	6,87	6,95	5,8	6,43	6,90
5.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	118,37	115,87	96,34	98,93	159,36
6.	Rasio Posyandu per 100 Balita	0,71	0,71	0,70	0,79	0,79
7.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per 100.000 penduduk	20	20	20	20	20
8.	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	3,00	3,19	3,14	2,5	2,5
9.	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	78	32	32	56	55
10.	Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk	4	5	7	18	27
11.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	59,34	67,36	78,00	69,66	71,22
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	88,59	91,02	88,60	85,88	88,04
13.	Cakupan Kelurahan UCI (%)	46,15	30,77	38,46	42,3	50
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	74,4	64,51	60,80	80	82,5
16.	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	1,59	0	0	3	3
17.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	48,60	50,23	25,00	50,4	12,5
18.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	37,17	100,00	100,00	79,9	58,9
19.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	Penderita diare yang ditangani (%)	39,74	78,00	49,60	35,84	12,00
21.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	9,23	n/a	n/a	n/a	n/a
22.	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	67,76	96,17	99,9	47,46	50,05
23.	Cakupan Puskesmas (%)	180,00	180,00	200,00	100	100
24.	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	69,23	69,00	69,00	70,00	70,00
25.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	91,50	94,33	96,30	90,68	89,97
26.	Cakupan pelayanan nifas (%)	84,63	86,73	85,20	82,23	86,03
27.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	47,86	50,66	51,20	43,27	52,04
28.	Cakupan pelayanan anak balita (%)	42,53	36,76	42,80	37,58	24,80
29.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	9,94	42,05	45,40	97,33	100
30.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	90,23	94,48	98,60	3,88	22,65
31.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	109,11	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33.	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100,00	83,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2022

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah terus mengembangkan sarana dan prasarananya. Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan dokter, tenaga medis/paramedis, puskesmas dan sarana/prasarana pada pusat pelayanan kesehatan.

Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Singkawang. Lokasi posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai karena idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita yang berguna untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Dokter dan Tenaga Medis di Kota Singkawang merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan jumlah dokter dan tenaga medis menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kota Singkawang.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator pelayanan umum bidang pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.19

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2017 -2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Pekerjaan Umum						
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	50,75	51,38	16,12	36	38,5
2.	Persentase jalan mantap	58,53	50,24	51,36	53,54	58,67
3.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk (km/jiwa)	0,21	0,21	0,20	0,20	0,18
4.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) (%)	23,75	15,05	16,12	36	38,5
5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min. 1,5m) (%)	1,82	1,82	1,82	n/a	n/a
6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	5,17	5,17	5,17	n/a	n/a
7.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	93,31	93,44	93,78	94,11	94,02
8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	44,17	8,98	8,98	n/a	n/a
9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	60,72	38,38	39,55	19,92	10,45
10.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	5	6,38	6,95	n/a	n/a

11.	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	36,02	40	45	50,29	n/a
12.	Rasio Jaringan Irigasi	0,60	0,02	0,02	n/a	n/a
13.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	42	38,11	39,74	39,17	40,9
14.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	50	n/a	n/a	n/a	73,17
15.	Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk	5,11	n/a	n/a	n/a	n/a
16.	Luas kawasan genangan banjir	2.289	2.268	2.198	59,84	62,06
B. Penataan Ruang						
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	45,43	45,44	45,51	n/a	n/a
2.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	5,00	4,9	4,8	n/a	n/a
3.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,70	0,70	0,70	n/a	n/a
4.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90,00	90,5	90,7	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2022

Penataan ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai upaya mencapai terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah secara terpadu. Luas wilayah Kota Singkawang yang sempit menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong proses penataan lahan cukup efektif.

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi upaya penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Singkawang masih perlu untuk ditingkatkan. Berikut ini merupakan indikator pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.20
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 -2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio rumah layak huni	0,1816	0,2044	0,2060	0,2070	0,2072
2.	Rasio permukiman layak huni	0,9720	0,9874	0,9986	0,9987	0,973
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	89,47	89,68	90,51	91,17	91,42
4.	Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau (%)	88,09	94,06	98,69	99,53	99,60
5.	Persentase permukiman yang tertata (%)	66,29	67,53	69,56	69,80	69,96
6.	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,061	0,029	0,023	0,017	0,109
7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani (%)	44,77	80,63	84,68	88,73	52,20

8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	74,81	75,96	76,50	77,35	78,27
9.	Persentase rumah layak huni (%)	89,47	89,68	90,51	91,17	91,42
10.	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kawasan perkotaan	44,77	80,63	84,68	88,73	6,03

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2022

Capaian ketersediaan rumah layak huni di Kota Singkawang relatif meningkat setiap tahun, walaupun realisasi belum mencapai target pada tahun 2021. Adapun beberapa kendala umum yang dihadapi dalam penanganan rumah tidak layak huni yaitu belum adanya penyusunan dokumen database jumlah rumah, Rumah Layak Huni (RLH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan belum optimalnya penataan, perencanaan, pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang tidak layak huni.

2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode 2017-2021 rata-rata mengalami peningkatan pada cakupan pelayanan bencana kebakaran kota dan tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran sebesar 100%. Gambaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.21
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	100	100	100	n/a	n/a
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	90	92,31	100	90	90
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	80	80	90	n/a	100
4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60	68,30	70,50	n/a	100
5.	Persentase penegakan Perda	90	92,31	100	90	90
6.	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak (%)	n/a	80	85	90	90

7.	Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban yang tertangani (%)	n/a	n/a	n/a	95	95
8.	Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk	n/a	n/a	n/a	3,3	3,3
9.	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	n/a	n/a	n/a	0,9	0,9

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, 2022

Secara umum capaian pelayanan guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Singkawang sudah cukup baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Kota Singkawang cukup kondusif antara lain penurunan jumlah pelanggaran perda, penegakan perda, penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) serta beberapa indikator lainnya.

2.1.3.1.6. Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Pelayanan sosial tersebut terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial selama periode 2017-2021 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.22
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Singkawang
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,18	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial) yang tertangani (%)	93,18	64,86	67,95	69,94	70,19
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	n/a	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	n/a	100	100	100	100
5.	Persentase rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (%)	n/a	26,21	12,60	22,89	22,95
6.	Persentase rehabilitas sosial dasar anak terlantar di luar panti (%)	n/a	3,65	24,10	34,72	34,74
7.	Pesentase rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (%)	n/a	56,52	36,94	40	40,08

8.	Persentase rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (%)	n/a	0,00	66,67	100	100
9.	Persentase perlindungan dan jaminan sosial melampaui pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	n/a	100	100	100	100
10.	Persentase penanganan kemiskinan dalam sesuai pemenuhan kebutuhan dasar (%)	n/a	96,68	77,57	78,30	79,95
11.	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial melampaui (LKS) dan SDM yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial (%)	n/a	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, aspek pelayanan umum dalam bidang sosial Kota Singkawang selama periode 2017-2021 cenderung fluktuatif. Namun interpretasi beberapa aspek sudah sesuai dan melampaui target, bahkan untuk persentase PPKS yang tertangani relatif meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk persentase rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar di luar panti masih rendah walaupun cenderung menurun setiap tahunnya. Hal ini di karenakan jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar lebih besar dari yang tertangani. Terkait permasalahan tersebut diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama periode 2017-2019 dapat disampaikan pada berikut ini.

Tabel 2.1.23
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan
Kota Singkawang Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun (per 1.000)	43,00	20,00	13,00
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	25,58	55,00	23,08
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	36,10	8,14	19,68
4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	29,96	n/a	0,10

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	0,77	0,00	9,09
6.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	18,97	0,00	37,70
7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100,00	0,00	100,00
8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	100,00	0,00	100,00
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	0,00	0,00	100,00
10.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	283,17	306,82	321,40

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, 2020

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan aspek serius dalam pembangunan manusia. Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks karena dianggap sebagai salah satu indikator berdayanya masyarakat suatu daerah. Gambaran kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Singkawang selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.24
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,90	8,21	6,12	10,98	10,81
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	10,00	10,00	23,33	23,33	23,33
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	n/a	16,55	11,88	n/a	13,76
4.	Rasio KDRT (%)	0,87	0,06	0,01	0,02	0,01
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	44,00	32,55	10,96	19,42	19,04
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	74,00	54,55	100,00	100,00	100,00
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	73,00	74,36	100,00	100,00	100,00
9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan	47,00	63,93	62,96	100,00	89,66

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)					
10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	78,00	88,52	67,50	100,00	89,66
11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	71,75	76,19	65,52	100,00	100,00
13.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

Pada tabel diatas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar -2,09%. Namun ditahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 4.86%. Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 13,33% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kapasitas dan kesadaran perempuan dalam kegiatan politik. Sedangkan untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta tertinggi ditahun 2018 yaitu sebesar 16,55%.

Berdasarkan data diatas, persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Singkawang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya sosialisasi, advokasi dan edukasi dalam membangun rumah tangga yang sehat, sehingga pemerintah mampu menekan angka kekerasan. Sedangkan untuk beberapa indikator cakupan lainnya sudah berakhir pada tahun 2014, sehingga persentase sudah melampaui target.

2.1.3.2.3. Pangan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pangan salah satunya ditunjukkan dengan angka ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama menggambarkan ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi oleh penduduk (per kapita) pada suatu daerah dalam satu tahun. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, pada tahun 2021 ketersediaan pangan utama Kota Singkawang sebesar 457,25 kg/kapita/tahun. Artinya pada tahun 2021 jumlah ketersediaan pangan utama yang dapat dikonsumsi setiap penduduk Kota Singkawang dalam satu tahun sebanyak 457,25 kg.

2.1.3.2.4. Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat setiap tahun dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Upaya masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya perlu didorong agar semua lahan yang dimiliki masyarakat, dan swasta dapat teregistrasi dengan baik. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya. Adapun gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di Kota Singkawang selama periode 2017-2021 dapat ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.1.25
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	52,76	59,31	59,58	61,26	61,26
2.	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	50,00	100,00	100,00	100,00	n/a

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2022

*) Angka Sementara

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Pada periode 2013-2019, upaya penanganan sampah relatif stabil namun lebih mengarah pada penurunan. Persentase penanganan sampah maupun TPS per satuan penduduk cenderung tetap. Hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga dan sarana pengelola kebersihan di Kota Singkawang relatif tetap, sementara jumlah penduduk dan produksi sampah terus meningkat. Untuk jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan armada pengangkutan sampah mengingat jumlah penduduk terus meningkat.

Dalam rangka menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan maka dilakukan penataan kawasan pemukiman dan pengawasan pencemaran. Dalam hal ini diupayakan semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum lingkungan.

Gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana ditampilkan tabel berikut :

Tabel 2.1.26
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup
Kota Singkawang Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersusunnya RPPLH Kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	tidak ada	ada	ada	ada	tidak ada
4.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air:	n/a	52,11	83,33	80,00	80,00
	a. Sungai Hangmoy	Cemar Ringan	22,11	21,67		
	b. Sungai Singkawang	Cemar Ringan	14,74	20		
	c. Sungai Semelagi	Cemar Ringan	7,89	21,67		
	d. Sungai Sedau	Cemar Ringan	7,37	20		
5.	Indeks kualitas udara (%)	Sangat Baik	85,4	88,89	85,85	87,77
6.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota (%)	90,00	100	95	100	23,30
7.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
8.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	Timbulan sampah yang ditangani (%)	29,99	35,54	36,97	37,20	41,88
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	93,91	0,057	0,052	3,47	9,44
11.	Indeks tutupan lahan (%)	n/a	n/a	26,62	30,21	33,80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, 2022

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil selama 5 tahun (2017-2021) dapat tergambar dari cakupan pelayanan administrasi kependudukan. Data mengenai kinerja ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.27**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Singkawang Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,71	0,86	0,91	0,98	0,98
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,26	0,90	0,92	0,96	0,98
3.	Rasio pasangan berakte menikah	0,25	0,31	0,36	0,43	0,49
4.	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	71,76	86,00	91,00	98,03	98,58
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	86,99	90,00	92,00	88,69	89,16

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, 2022

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio penduduk ber-KTP terus meningkat mencapai angka 0,98 dari jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2020 dan 2021, dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 0,71. Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan serta belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi penduduk yang melanggar administrasi kependudukan.

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kota Singkawang cenderung aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Sejak 2017 semua kelompok PKK didorong terus sehingga semuanya aktif kembali dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Posyandu yang selama ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi balita juga aktif semuanya.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di Kota Singkawang selama periode 2017-2021 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.28
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	100,00	100,00	81,25	100,00	100,00
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	15,63	100,00	96,88	100,00	100,00
3.	Persentase LSM aktif (%)	55,04	55,00	50,00	100,00	100,00
4.	Persentase PKK aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase Posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, 2022

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama periode 2017-2019 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.29
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2,09	2,03	2,03		
2.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	100,00	n/a	n/a		
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	18,20	n/a	n/a		
4.	Rasio akseptor KB (%)	49,80	56,50	56,39		
5.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	15,00	n/a	43,47		
6.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	100,00	n/a	n/a		
7.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	15,00	n/a	n/a		
8.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	19,00	n/a	n/a		

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
9.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00		
10.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	52,00	100,00	100,00		
11.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	0,17	n/a	n/a		

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, 2020

2.1.3.2.9. Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Singkawang jika dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun (2017-2021), jumlahnya mengalami penurunan dari 103.300 penumpang pada tahun 2017 menjadi 12.559 penumpang pada tahun 2021. Penurunan tersebut terjadi diduga disebabkan oleh makin banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi. Rasio ijin trayek terus menurun karena jumlah ijin trayek berkurang sedangkan jumlah penduduk terus bertambah. Jumlah penumpang angkutan umum pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya peningkatan adanya penggunaan kendaraan pribadi dan munculnya angkutan umum *online*. Gambaran mengenai kinerja pelayanan umum dalam bidang perhubungan sebagai berikut.

Tabel 2.1.30
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Singkawang
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	103.300	47.798	36.159	5.986	12.559
2.	Rasio ijin trayek	0,00005	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
3.	Jumlah uji KIR angkutan umum	355	312	212	285	272
4.	Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	2	2
5.	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2
6.	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,052	0,065	0,060	0,253	0,51
7.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	70,85	95,00	93,00	100,00	100,00
8.	Pemasangan rambu-rambu (%)	87,16	90,00	90,00	70	70

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
9.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0711	0,0800	0,0800	0,0058	0,0058
10.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	40.583	47.798	36.159	5.986	12.559
11.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (ton)	7.469	11.000	7.010	6.577	1.698,78
12.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	40.583	47.798	36.159	5.986	12.559
13.	Jumlah Bandar Udara	n/a	n/a	n/a	1	1
14.	Rasio panjang kota yang mendapatkan penerangan	n/a	n/a	n/a	41,5	41,9

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Singkawang, 2022

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informasi

Gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kota Singkawang selama periode 2017-2021 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.31
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Komunikasi Publik (%)	n/a	80	82
2.	Persentase penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dalam pelayanan publik (%)	50	100	100
3.	Persentase terpenuhinya infrastruktur TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) penunjang pelayanan publik dan pemerintahan Kota Singkawang (%)	70	70	89
4.	Persentase terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang (%)	50	50	75
5.	Persentase jumlah <i>upload</i> berita dan informasi melalui <i>website</i> , media cetak, media elektronik dan sosial (%)	n/a	100	100
6.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan (%)	n/a	0	20
7.	Cakupan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui PPID Kota Singkawang (%)	n/a	0	20
8.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	n/a	20	35
9.	Persentase peningkatan SDM persandian (%)	n/a	0	10
10.	Cakupan tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah (%)	n/a	0	70

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2022

2.1.3.2.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Persentase koperasi aktif pada tahun 2017-2021 menunjukkan adanya peningkatan, namun ditahun 2017 angka masih dibawah 50 persen, artinya pada tahun 2017 lebih banyak koperasi yang tidak aktif dibanding yang aktif. Untuk UKM Non BPR/LKM aktif dan Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2017-2019 menunjukkan hampir 100%. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2017-2021 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.32
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase koperasi aktif (%)	35,37	61,22	64,00	n/a	74,29
2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	98,38	98,59	98,72	n/a	n/a
3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	97,41	97,29	97,21	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2022

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2017-2021 pada setiap indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.33
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	119	114	366	n/a	n/a
2.	Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) (Milyar Rp.)	76,92	110,57	505,70	830,28	610,36
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	4,77	2,97	3,40	n/a	n/a
4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	-1,31	43,73	357,35	n/a	n/a

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, 2022

Adanya perubahan indikator dari tahun 2020-2021 dalam aspek pelayanan umum bidang penanaman modal. Hanya jumlah nilai realisasi investasi di Kota

Singkawang yang ada capaiannya dari tahun 2017-2021 yaitu cenderung fluktuatif.

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga selama periode 2017-2021 dapat disampaikan melalui tabel berikut.

Tabel 2.1.34
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	75,00	87,00	75,00	70,00	75,00
2.	Persentase wirausaha muda (%)	0,07	n/a	n/a	n/a	0,59
3.	Cakupan pembinaan olahraga (%)	n/a	50	58	0	10
4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	n/a	53,68	53,68	n/a	n/a
5.	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	n/a	75	80	n/a	n/a
6.	Jumlah atlet berprestasi	25	110	11	0	3
7.	Jumlah prestasi olahraga	13	17	5	0	3

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, 2022

Secara umum terjadi penurunan dalam urusan kepemudaan dan olahraga dari tahun 2020-2021, hal ini terjadi karena adanya wabah pandemi Covid-19, yang membuat kegiatan kepemudaan dan olahraga dibatalkan atau dilarang untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak.

2.1.3.2.13 Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode 2017-2021 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.35
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Singkawang
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada				
2.	Buku "Daerah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB Daerah"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, 2022

Dari tabel urusan statistik di atas tergambar bahwa dokumen-dokumen statistik tersedia dari tahun 2017-2019. Data-data tersebut agar senantiasa diupdate sesuai perkembangan dan kebutuhan. Namun untuk sistem data dan statistik yang terintegrasi sampai tahun 2017 masih belum terbangun.

2.1.3.2.14. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Singkawang dalam lima tahun terakhir (2017-2021) cenderung fluktuatif. Sementara untuk pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya terus meningkat atau menunjukkan kinerja yang baik, karena dalam lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Gambaran kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan selama periode 2017-2021 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.36
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan
Kota Singkawang Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali/tahun)	3	6	5	2	1
2.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	66,60	76,30	73,20	80,33	81,30
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	-	13	14	64	64
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, 2022

2.1.3.2.15. Perpustakaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2017-2021 melalui beberapa indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.37
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	18.078	19.562	17.932	9.016	9.196

2.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	32.612	32.950	36.440	36.440	37.050
3.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,041	0,960	0,830	1,09	1,08
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan	1.507	1.630	1.494	751	766
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	8.865	9.040	9.738	9.738	10.460
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, 2022

2.1.3.2.15. Kearsipan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan selama periode 2017-2021 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.38
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	51,72	62,07	72,41	62,07	79,31
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	55	58	58	-	58

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, 2022

Secara umum pengelolaan kearsipan mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019. Hanya ditahun 2020 yang mengalami penurunan dan tidak adanya peningkatan SDM dalam pengelolaan kearsipan.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama periode 2017-2021 dapat tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.1.39
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Produksi perikanan (%)	76,03	216,94	53,20	n/a	85,35

2.	Konsumsi ikan (%)	99,85	98,40	97,70	n/a	95
3.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	11,30	25,60	22,60	n/a	41,35
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	74,77	38,90	48,27	n/a	80

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, 2022

Tabel 2.1.40
Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya di Kota Singkawang (ton) Tahun 2017-2021

No	Nilai Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Perikanan Laut	1244,91	4293,48	4213,50	3283,33	3605,97
2	Perikanan Umum	118,96	-	72,60	79,91	70,92
3	Perikanan Budidaya	1126,10	2019,36	1910,20	1713,11	1973,25
Jumlah		2589,97	6312,85	6196,30	5076,35	5650,14

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, 2022

Kota Singkawang yang merupakan kota pesisir mempunyai potensi besar dalam produksi perikanan dan hasil laut lainnya. Jumlah produksi ikan selama 5 tahun cenderung fluktuatif, dan produksi ikan kelompok nelayan juga sama cenderung fluktuatif ditahun 2017-2021.

Konsumsi ikan di Kota Singkawang selama 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Masa hidup komoditas ikan segar cenderung pendek, mengakibatkan kualitas ikan akan menurun dan konsumsi ikan akan terkena imbasnya.

2.1.3.3.2. Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2017-2021 dapat dilihat melalui indikator pada tabel berikut.

Tabel 2.1.41
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	652.184	684.793	722.853	529.647	642.114
2.	Lama kunjungan wisata	1,9	1,9	2,2	0,33	2
3.	PAD sektor pariwisata (%)	7,07	9,49	10,36	n/a	n/a
4.	Cakupan Ekonomi Kreatif (%)	n/a	41,76	75	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, 2022

Kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang dalam 5 (lima) tahun terakhir fluktuatif karena kondisi Pandemi dalam 2 (dua) tahun terakhir mengakibatkan menurunnya kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang. Kontribusi PAD sektor pariwisata didekati dengan PAD yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Kontribusi PAD sektor pariwisata dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif kecil terhadap total PAD.

2.1.3.3.3. Pertanian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2017-2021 secara ringkas tergambar melalui indikator pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.42
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (%)	12,85	12,32	12,31	12,23	11,96
2.	Kontribusi sub sektor pertanian (pangan dan holtikultura) terhadap PDRB sektor pertanian (%)	27,29	25,22	24,40	23,06	21,615
3.	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	18,97	18,82	17,49	17,65	16,91
4.	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100
5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	2,93	1,80	3,26	3,37	3,535
6.	Cakupan bina kelompok petani (%)	9,59	8,50	6,42	19,26	17,675

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, Tahun 2017

2.1.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumber daya mineral periode 2017-2021 pada masing-masing indikator ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.43
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase RT yang menggunakan listrik (%)	89,11	96,88	97,86	99,51	98,76
2.	Pertambangan tanpa ijin (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Singkawang, 2020; BPS Kota Singkawang 2022

2.1.3.3.5. Perdagangan

Cakupan bina kelompok pedagang cukup tinggi, lebih dari setengah kelompok pedagang/usaha informal mendapat bantuan binaan pemda, kecuali tahun 2017 yang tidak mencapai setengahnya karena terjadi peningkatan jumlah kelompok pedagang. Data cakupan bina kelompok pedagang selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.44
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda	6	8	8	12	12
2.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	13	13	13	13	13
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	46,15	61,54	65,54	92,3	92,3

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2022

2.1.3.3.6. Perindustrian

Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2018-2019 sama yaitu sebesar 83,33 persen, yaitu 5 dari 6 kelompok pengrajin yang ada di Kota Singkawang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Singkawang. Data cakupan bina kelompok pengrajin selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.45
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binan pemda	3	5	5	4	4
2.	Jumlah kelompok pengrajin	6	6	6	n/a	n/a
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	50,00	83,33	83,33	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, 2022

2.1.3.4. Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Setiap tahun anggaran pemerintah Kota Singkawang secara rutin melakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk penyusunan RKPD Kota Singkawang tahun 2023 mengacu pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025 yang dikomparasikan dengan usulan masyarakat hasil musrenbang tingkat Kota Singkawang dan pokok-pokok pikiran DPRD. Dokumen RKPD tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Walikota setiap tahun. Gambaran pelayanan umum dalam bidang perencanaan pembangunan dapat disampaikan berikut ini.

Tabel 2.1.46
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
5.	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang 2022

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing merupakan aspek penting untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indikator yang menjelaskan aspek daya saing Kota Singkawang diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.47
Aspek Daya Saing Daerah Kota Singkawang, Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rata-rata pengeluaran	471.969,72	639.227,31	688.383,19	717.166,83	741.202,08

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	per kapita sebulan (Jumlah Makanan) (Rupiah)					
2.	Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan (Jumlah Bukan Makanan) (Rupiah)	515.249,10	646.831,71	665.236,55	802.391,42	807.483,50
3.	Persentase pengeluaran per kapita sebulan (Jumlah Makanan)	47,81	49,70	50,85	47,20	47,86
4.	Persentase pengeluaran per kapita sebulan (Jumlah Bukan Makanan)	52,19	50,30	49,15	52,80	52,14

Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka, 2022

Secara rata-rata selama 2017-2021 total pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan, konsumsi bukan makanan lebih mendominasi dibandingkan konsumsi makanan. Semakin besar pengeluaran rumah tangga bukan makanan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan akan semakin baik.

2.2 Evaluasi Realisasi Kinerja dan Capaian Perangkat Daerah Tahun 2021

Evaluasi Realisasi Kinerja dan Capaian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :